

ISSN 1411-3457

ULUMUNA

Jurnal Studi Keislaman

Volume XI • Nomor 1 • Juni 2007

TELAAH HISTORIS
PERKEMBANGAN ORIENTALISME ABAD XVI-XX
Rendra Khaldun

MENYIBAK
KEKERASAN SIMBOLIK ORIENTALISME
Iswahyudi

ORIENTALISME
DAN UPAYA DIALOG ANTARPERADABAN
Mutiullah

MENGARIFI ORIENTALISME:
MERETAS JALAN KE ARAH
INTEGRASI EPISTEMOLOGI STUDI ISLAM
Afrizal

ORIENTALISME, LIBERALISME ISLAM,
DAN PENGEMBANGAN STUDI ISLAM DI IAIN
Ahwan Fanani

MENGURAI RADIKALISME AGAMA DI INDONESIA
PASCA ORDE BARU
Abdul Mukti Ro'uf

ISI

TRANSLITERASI

ANTARAN

UTAMA

- Rendra Khaldun** Telaah Historis Perkembangan Orientalisme Abad XVI-XX • 1-26
- Iswahyudi** Menyibak Kekerasan Simbolik Orientalisme • 27-52
- Mutiullah** Orientalisme dan Upaya Dialog Antarperadaban • 53-72
- Afrizal** Mengarifi Orientalisme: Meretas Jalan ke Arah Integrasi Epistemologi Studi Islam • 73-92
- Ahwan Fanani** Orientalisme, Liberalisme Islam, dan Pengembangan Studi Islam di IAIN • 93-120

LEPAS

- Miftahul Huda** Membaca Teks Hadis: Antara Makna Literal dan Pesan Utama • 121-140
- Ismail Thoib** Menggagas Reformasi Pendidikan Islam: Telaah Filosofis Paradigmatik • 141-156
- Abdul Mukti Ro'uf** Mengurai Radikalisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru • 157-176
- Ahmad Fathan Aniq** Rejection of Perda Zakat in East Lombok: Public Criticism on Public Policy • 177-198

ULAS BUKU

- Fachrizar Halim** Self-Criticism to Arab and Muslim Intellectuals • 199-212

INDEKS

MENGGAGAS REFORMASI PENDIDIKAN ISLAM: TELAAH FILOSOFIS PARADIGMATIK

Ismail Thoib*

Abstract

Discourse of religious education reform highlights at least two important pillars, philosophical and theoretical framework. Both frameworks are convinced as strong foundation of religious education development under rational-empirical principles of world society development. A lot of violence on the name of religion occur in the world and, to some extent, are found as religious education failure because of its exclusive learning model, which drive students far from their real multidimensional life problems. Responding to such situation religious education need to reform itself properly. In the context of Islamic education reform, we need to develop a kind of paradigmatically philosophical logics of Islamic education. There are two steps to take: forming philosophically fundamental framework of education, and developing rationally and empirically principles of educational practices in accordance with its structural and cultural context. It implies that the logics of Islamic education philosophically deal with both profane and sacred dimension of human life.

Keywords: Pendidikan Islam, Nalar Klasik, Nalar Filosofis, Islamisasi Ilmu.

SALAH satu fenomena yang menghentak dalam beberapa dekade belakangan ini adalah munculnya kecenderungan fundamentalisme dalam beragama. Ekspresi fundamentalisme ini terkadang cukup mengerikan karena memunculkan varian

*Penulis adalah dosen di Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram, NTB.
e-mail: ismail_thoib@yahoo.com

kekerasan atas nama agama. Fenomena keagamaan seperti ini tentu saja mengejutkan banyak pihak, khususnya mereka yang sering berpendapat bahwa sekularisme saat ini dan masa yang akan datang adalah suatu keniscayaan, dan agama tidak akan terlalu banyak mengambil peran dalam banyak peristiwa besar dunia. Aksiomanya, jika manusia menjadi lebih rasional, maka mereka tidak akan lagi membutuhkan agama atau pada titik tertentu, peran agama akan dimasukkan ke dalam wilayah privat. Ini merupakan sebuah fakta sosiologis-empiris yang paling banyak mewarnai kehidupan beragama saat ini.

Isu pendidikan memang tidak pernah usang dicuatkan di tengah-tengah masyarakat, terutama di abad XXI ini. Pendidikan secara umum kian dipertanyakan tentang mutu dan perkembangannya. Pendidikan sampai detik ini masih diyakini sebagai salah satu agen perubahan sosial (*the agent of social change*) dalam realitas kehidupan sosial yang terus berlangsung tanpa henti. Di samping itu, pendidikan diyakini merupakan proses untuk menumbuhkan sebuah bentuk budaya politik masyarakat (*a form of cultural politics of society*) yang dalam perspektif tertentu mengarah pada masa depan yang lebih baik dan mencerahkan.

Sejarah di Indonesia membuktikan bahwa begitu banyak konflik atau kekerasan, baik langsung maupun tidak langsung, struktural maupun kultural yang muncul di tengah kehidupan masyarakat. Rentetan kasus tidak sedap dalam konteks sosial, politik, ekonomi, maupun budaya masyarakat—tanpa menafikan aspek kepentingan-kepentingan tertentu—dapat diasumsikan merupakan buah dari model pembelajaran serta pendidikan yang lebih bersifat *manqûlah al-'aqâ'id* yang berpola indoktrinasi-bayaniyah dan pensakralan pemikiran keagamaan (*taqdîs al-afkâr al-dîniyah*). Implikasi dari model pendidikan seperti ini pada akhirnya akan menghasilkan sebuah kebudayaan eksklusif dan kurang tanggap (responsif) terhadap doktrin-doktrin agama lain. Kerangka pemikiran (*frame of thought*) seperti di atas menjadi sebuah potret tersendiri bagi lembaga pendidikan tinggi Islam

sehingga mengalami kebuntuan ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan empiris rasional dewasa ini yang semakin *complicated* dan *sophisticated*.

Dengan demikian, sesuai dengan realitas dan konteks tertentu, maka pencarian metode dan alternatif pendidikan agama (*religious education*) yang integratif sekaligus inklusif di tengah arus modernisasi dan dinamika tantangan dunia global yang kompetitif ini menjadi keniscayaan. Di sinilah upaya pembenahan di segala bidang dalam rangka menyelamatkan proses transformasi pendidikan ini diperlukan agar dapat menjadi motor penggerak perubahan kondisi bangsa. Dalam konteks transformasi keilmuan telah menjadi keharusan dan tanggungjawab semua pihak untuk melakukan rekonstruksi bangunan paradigma yang dapat dijadikan dasar bagi pengembangan dan reformulai sistem pendidikan agama di Indonesia sehingga memiliki kekuatan dan daya elastisitas yang tinggi ketika bersentuhan dengan persoalan kekinian? Inilah di antara kegelisahan penulis untuk dielaborasi lebih lanjut dalam tulisan ini.

Dilema Pendidikan Islam

Pada dasarnya, pendidikan tinggi Islam merupakan sebuah institusi sosial yang menjadi bagian integral dari masyarakatnya. Sebagai sebuah institusi sosial, pendidikan secara ideal memiliki fungsi budaya, yaitu untuk melestarikan dan mengembangkan sistem nilai masyarakat. Sebagai suatu *organized intelligence*, ia menjadi *centrum* dari berbagai kecerdasan yang diorganisasi untuk menghasilkan sebuah masyarakat yang beradab. Dalam fungsi itu, perguruan tinggi Islam mempunyai kekuatan vital karena memiliki tugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sulit dibayangkan ilmu pengetahuan akan dapat dipertahankan dan dikembangkan tanpa adanya lembaga yang bergerak di bidang itu. Dalam konteks itu, perguruan tinggi Islam bertugas melestarikan dan mengembangkan ilmu

pengetahuan yang sesuai dengan cita-cita etika dan sistem nilai masyarakatnya. Melalui seleksi dan penyelenggaraan pendidikan yang sistematis, pendidikan tinggi Islam melakukan pewarisan cita-cita peradaban Islam. Demikianlah secara ideal fungsi pendidikan Islam sesungguhnya merupakan fungsi kultural untuk melestarikan dan mengembangkan masyarakat. Dalam fungsi ideal itu pula, lembaga pendidikan Islam memiliki tugas mengontrol dan mengarahkan perkembangan masyarakat.¹

Pendidikan termasuk pendidikan Islam merupakan proses untuk menumbuhkan sebuah bentuk budaya politik masyarakat (*a form of cultural politics of society*) dalam perspektif tertentu yang mengarah pada masa depan yang lebih baik dan mencerahkan. Pendidikan secara eksplisit maupun implisit memang mempunyai pengaruh terhadap perilaku masing-masing individu dan membentuk suatu budaya politik tertentu.² Konsep ini dapat dikatakan sejalan dengan target pendidikan dalam Islam yang tidak hanya diorientasikan untuk transformasi keilmuan ajaran Islam pada peserta didik, melainkan juga terinternalisasi dalam pribadi, bahkan teraktualisasikan dalam perilaku sehari-hari.

Sementara itu, apabila melihat realitas pendidikan Islam, terutama pendidikan tinggi Islam, seperti STAIN/IAIN/UIN nampaknya belum diorientasikan pada ketiga proses tersebut di atas. Padahal bagi sebagian kalangan muslim, utamanya yang tinggal di pedesaan, lembaga pendidikan tinggi tersebut di atas merupakan satu-satunya pilihan terbaik.³ Barangkali kondisi ini tidak berlebihan dikarenakan biaya pendidikan di STAIN/IAIN/UIN adalah termurah dan mudah dijangkau oleh

¹Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1998), 349.

²Mohtar Buchori, "Peranan Pendidikan dalam Pembentukan Budaya Politik di Indonesia", ed. Sidhunata, *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 30.

³Azyumardi Azra, *Modernisasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), 138.

sebagian besar kalangan di pedesaan yang memang memiliki kelemahan secara finansial.

Apresiasi masyarakat yang positif itu juga tidak terlepas dari keberhasilan lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan tersebut di atas yang telah mampu melahirkan pemikir di kalangan masyarakat (*intellectual society*) yang sering menjadi incaran para “nyamuk pers” untuk dimintai pendapatnya terhadap berbagai peristiwa aktual, baik lokal, nasional maupun internasional. Ini tentu merupakan evidensi menarik dalam sejarah, di mana dengan biaya pendidikan yang relatif murah, institusi STAIN/IAIN/UIN mampu memberikan *output* handal yang mampu menjawab dinamika kehidupan.

Namun demikian, sekalipun lembaga pendidikan tinggi Islam seperti STAIN/IAIN/UIN ini mampu menelorkan *output* yang mampu berbicara di pentas nasional bahkan internasional, tetapi mereka tidak lebih dari kalangan minoritas semata. Hal ini karena pada kenyataannya mayoritas *output* kurang begitu diperhatikan di pasar kerja,⁴ kreativitas intelektual yang *mandeg*. Sejatinya, tujuan pembaruan dalam pendidikan pada akhirnya adalah untuk menjaga agar “produk” yang dihasilkan dari pendidikan tersebut tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja atau persyaratan bagi pendidikan lanjut pada jenjang pendidikan berikutnya.⁵ Kita tentu tidak menginginkan lembaga pendidikan

⁴Pada tataran praksis misalnya, terdapat kebijakan pemerintah yang mengatur bahwa alumni IAIN hanya dapat melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lembaga-lembaga atau institusi yang berada di bawah kewenangan Departemen Agama *an sich*. Kondisi ini tentu sangat menyedihkan dan dengan sendirinya sangat membatasi ruang gerak alumni IAIN. Hal ini berimplikasi terhadap tingginya angka pengangguran di kalangan alumni IAIN; tetapi yang perlu ditekankan adalah fenomena pengangguran ini bukanlah milik satu-satunya dari alumni lembaga pendidikan tinggi Islam seperti IAIN, tetapi telah menjadi milik alumni-alumni dari kampus pendidikan tinggi umum lain, baik negeri maupun swasta.

⁵Suyanto dan Jihad Hasyim, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III* (Yogyakarta: Adicipta Karya Nusa, 2000), 22.

dikelola secara ‘apa adanya’ karena hanya akan menghasilkan lulusan yang ‘apa adanya’ pula, *poorly educated*, atau *mismatch* dengan realitas sosio-kultural yang dihadapi masyarakat.

Antagonisme Pendidikan Islam

Islam merupakan sebuah sistem nilai dan norma yang dinamis yang harus dipahami serta diterjemahkan berdasarkan *setting* sosial dan dimensi ruang dan waktu tertentu. Karena itu secara praksis, dalam Islam tidak terdapat sistem ekonomi, politik, pendidikan, budaya, dan lain sebagainya yang tersurat dan baku.⁶ Wajah Islam yang dinamis seperti di atas tidak banyak berpengaruh dalam melahirkan pendidikan Islam yang dinamis. Dalam tataran praksis pendekatan yang dipergunakan dalam dunia pendidikan Islam lebih bersifat keagamaan, normatif, dan doktriner, sehingga peran peserta didik diarahkan untuk memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap agama yang dipelajari. Sementara kajian-kajian keilmuan yang lebih bersifat empiris, rasional, dan analitis-kritis dianggap dapat menggoyahkan keimanan. Karena itu pelaksanaan pendidikan Islam didominasi oleh pendekatan keagamaan yang berifat normatif-doktriner dengan harapan tidak menggoyahkan iman peserta didik.

Pemahaman di atas menurut Azyumardi Azra muncul ketika umat Islam Indonesia mengalami masa penjajahan yang sangat panjang. Akibat penjajahan, umat Islam mengalami keterbelakangan dan disintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Hal ini ditandai dengan munculnya kaum intelektual baru hasil pendidikan Barat yang “sekuler”. Mereka dilawankan dengan kaum intelektual lama yang sering dikonotasikan dengan kaum sarungan yang hanya mengerti soal-soal keagamaan *an sich*, akan tetapi buta terhadap

⁶A. Malik Fadjar, *Reformasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), 29.

soal-soal keduniawia.⁷ Karena itulah, muncul gagasan di kalangan ulama untuk menciptakan “ulama intelektual” dan “intelektual ulama”.⁸

Akan tetapi, pada kenyataannya, pelaksanaan pendidikan Islam lebih berorientasi pada persoalan keakhiratan yang sifatnya metafisis-normatif dengan menitikberatkan pada penghafalan teks-teks keagamaan. Hal itu menjadikan proses pendidikan Islam seringkali kurang menarik dari aspek materi dan metode penyampaian yang digunakan. Kondisi ini pun diperparah dengan terisolasinya atau kurang terintegrasinya materi pendidikan Islam dengan materi pelajaran lain.⁹ Desain kurikulum pendidikan Islam masih didominasi oleh masalah-masalah yang bersifat normatif, ritual, dan eksatologis. Materi pendidikan Islam yang diajarkan lebih didasari oleh semangat ortodoksi keagamaan untuk “penanaman keimanan”, dan bukan ortopraksis, yakni bagaimana mewujudkan iman keagamaan dalam tindakan nyata operasional.¹⁰

Semangat ortodoksi keagamaan yang melandasi pendidikan Islam mengakibatkan terjadinya pemaksaan kepada peserta didik untuk tunduk pada suatu meta narasi yang ada dan tidak diberikan peluang untuk melakukan telaah secara kritis. Inilah yang mengakibatkan begitu banyak konsepsi ajaran dalam agama yang hanya akan dipandang sebagai suatu hal yang final dan harus diterima *taken for granted*. Menurut Paulo Freire, semangat ortodoksi ini menempatkan pendidik sebagai *banking concept* yang

⁷ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 159.

⁸ Deliar Noer, *Masalah Ulama Indonesia atau Intelektual Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 8.

⁹ A. Malik Fadjar, “Menyiasati Kebutuhan Masyarakat Modern Terhadap Pendidikan Agama Luar Sekolah”, *Makalah* disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya tentang Pengembangan Pendidikan Islam Menyongsong Abad 21.

¹⁰ Hujair A. H. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia* (Yogyakarta: Safirian Insani Press, 2003), 165.

melulu tugasnya menanamkan nilai tertentu dan terus memasung peserta didik dengan semangat otoritarian dan dogmatis.¹¹ Karena itu, metode pembelajaran yang dikembangkan bersifat *teacher center*, *rote memorization*, dan *examination ridden*.¹² Akibatnya, pendidikan Islam menjadi tidak fungsional dalam kehidupan sehari-hari, kecuali hanya sedikit aktivitas verbal yang menghabiskan materi atau kurikulum yang telah diprogramkan dengan batas waktu yang telah ditentukan.¹³

M. Amin Abdullah menyoroti persoalan kurikulum dan kegiatan pendidikan Islam yang berlangsung selama ini dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1) pendidikan Islam lebih banyak terkonsentrasi pada persoalan-persoalan teoritis keagamaan yang bersifat kognitif semata-mata serta amalan ibadah praktis, 2) pendidikan Islam kurang “*concern*” kepada persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi makna dan nilai yang perlu diinternalisasikan dalam diri siswa lewat berbagai cara, media, dan forum, 3) pendidikan agama lebih menitikberatkan pada aspek korespondensi-tekstual, yang lebih menekankan pada aspek hafalan teks-teks keagamaan yang sudah ada, 4) sistem evaluasi, terutama bentuk-bentuk soal ujian agama Islam menunjukkan prioritas utama pada aspek kognitif dan jarang pertanyaan tersebut mempunyai muatan nilai dan makna spirituil keagamaan yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

Dari pandangan di atas, nampak bahwa pendidikan Islam tengah berhadapan dengan tantangan dan permasalahan yang

¹¹Paulo Freire, *Pedagogy of Opressed* (New York: Penguin, 1978).

¹²Wasiullah Khan, *Education and Society in The Muslim Worlds* (Jeddah: Hodaler & Sroughton, t.t).

¹³Romo YB. Mangunwijaya, “Kritik Manajemen Pendidikan Nasional Selama Orde Baru”, *KOMPAS*, 12 Februari 1999, 5.

¹⁴M. Amin Abdullah, “Problem Epistemologis-Metodologis Pendidikan Islam”, ed. Abd. Munir Mul Khan, *Rekonstruksi dan Tradisi Pesantren Religiusitas IPTEK* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 49-50.

begitu kompleks, baik tantangan internal maupun eksternal. Permasalahan internal berkaitan dengan orientasi pendidikan Islam yang kurang tepat, perencanaan dan penyusunan materi, metodologi, dan evaluasi yang kurang tepat. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan Islam masih bersifat doktriner, eksklusif. Sedangkan tantangan eksternal yang dihadapi berupa berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memunculkan *scientific criticism* terhadap pelajaran agama yang masih bersifat konservatif, tradisional, dan tekstual. Kenyataan ini tentu menjadi tantangan sekaligus peluang pendidikan di Indonesia, di mana madrasah dituntut untuk meningkatkan kualitas bidang studi umum dengan tetap mempertahankan kekuatan sebagai “benteng moral”. Bagi sekolah umum pun ditantang untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama sebagai “benteng moral” dan tetap mempertahankan keunggulan dalam bidang studi umum yang digelutinya.¹⁵

Tantangan di era globalisasi dalam bidang informasi, perubahan sosial, budaya dan ekonomi dengan segala dampaknya, kemajemukan masyarakat yang masih belum siap untuk berbeda paham dan justru cenderung bersikap apologis, fanatik, absolutis serta *truth claim* yang dibungkus dalam simpul-simpul kepentingan, baik yang menyangkut pribadi maupun golongan yang bersifat politis maupun sosiologis.¹⁶ Hal ini merupakan sebagian dari ruang tantangan dalam dunia pendidikan Islam ke depan sekaligus menjadi peluang bagi peningkatan kualitas pendidikan Islam. Pendidikan agama yang diajarkan secara eksklusif di sekolah-sekolah umum maupun sekolah-sekolah agama sebagai satu-satunya jalan keselamatan

¹⁵Husni Rahim, “Pendidikan Agama di Indonesia (Perspektif Perguruan Tinggi Agama Islam)”, *Makalah* disampaikan dalam Seminar tentang Pendidikan Agama Islam di Indonesia oleh Program Pascasarjana UMY, 15 Juli 2004, 2-3.

¹⁶Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 92.

(*salvation and truth claim*) akan sangat potensial melahirkan konflik dan ketidakrukunan antar pemeluk agama. Kalaupun kata ini disinggung dalam pendidikan agama, lebih bersifat artifisial, karena tidak mencerminkan dialektika, dinamika, apalagi kerjasama.¹⁷ Ini senafas dengan metode pendidikan yang juga harus memperhatikan pentingnya faktor keragaman kelompok kultural suatu masyarakat sehingga tidak mengakibatkan ekseseks negatif di tingkat peserta didik.

Nalar Filosofis Pendidikan Islam

Berangkat dari problem-problem pendidikan Islam sebagaimana digambarkan di atas, maka reformasi atau malah dekonstruksi pendidikan Islam menjadi suatu keharusan yang tidak terelakkan. Upaya reformasi pendidikan Islam harus dimulai dengan reformasi pada tataran filosofis-paradigmatik. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa pendidikan islam, sebagaimana bidang keilmuan Islam lainnya, masih didasarkan pada nalar klasik yang terbekuk oleh nalar *bayâni*, meminjam istilah Mohammad Abid al-Jabîrî, yang cenderung bersifat *nirhistoris* dan kurang mengaitkannya dengan perkembangan ilmu bahasa.¹⁸

¹⁷Zakiuddin Baidhawiy, "Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural: Sebuah Konsep Alternatif", *Jurnal Taswirul Afkar*, no. 16 (2004), 116.

¹⁸Nalar, seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menemukan kebenaran tentang apa yang terkandung dalam dogma dan kepercayaan yang dianut, bukan hanya untuk menyusun dan menegaskan atau menjelaskan dogma dan kepercayaan yang cenderung apologistik. Itulah sebabnya, mengapa pemikiran atau nalar Islam yang *nirhistoris* tersebut, sangat bersifat tautologis, yaitu mengulang-ulang teks yang kebenaran idealistiknya sudah tidak perlu diulang-ulang lagi. Setiap kegiatan berpikir dikuasai oleh gambaran dogmatis dan dorongan utama dari setiap renungan tidak bersifat ilmiah dalam makna modern, tetapi bersifat estetis-etis. Di kalangan para ahli teologi dogmatis (*mutakallimîn*) dan para ahli hukum (*fuqahâ*) yang mengangkat tema untuk tujuan utamanya mengaktualisasikan unsur transendental ke dunia ini secara kongkret, menggunakan prosedur

Karena itu, langkah awal yang harus dilakukan adalah merumuskan kerangka dasar filosofis pendidikan, kemudian mengembangkan secara rasional-empiris prinsip-prinsip yang mendasari keterlaksanaannya dalam konteks lingkungan sosial dan kultural. Tanpa kerangka dasar filosofis serta kerangka teoritis yang kuat, maka reformasi pendidikan Islam, di samping tidak memiliki pondasi yang kuat juga tidak mempunyai arah yang pasti dan dapat terombang ambing tanpa arah yang jelas. Demikian juga dengan permasalahan pendekatan dalam kajian ataupun penelitian keislaman, tidak hanya mengandalkan pola koherensi dan korespondensi, tetapi juga melibatkan unsur penghayatan dan pemaknaan (*verstehen*).¹⁹

Pergeseran paradigmatik dari yang hanya berpola normatif-tekstual-*bayânî* menuju pola empiris-historis-*burhânî* tentu berimplikasi pula pada adanya suatu keniscayaan redefenisi tentang konsep-konsep dalam pendidikan agama. Dalam menjawab tuntutan moral dan spiritual, pandangan yang menganggap ilmu pengetahuan sebagai bebas nilai mengusulkan perlunya pengembangan etika agama dalam kehidupan praktis yang lebih fungsional. Sejauh ini agama lebih dipraktekkan dalam rangkaian-rangkaian ritual formal, padahal sebagai agama suci dan paripurna, Islam memiliki dasar-dasar etis dalam semua aspek kehidupan yang menjadi landasan perilaku yang bermoral. Dalam diri manusia yang memiliki konsistensi etis inilah ilmu

pemikiran yang seringkali semena-mena, dengan mengesampingkan setiap kesaksian yang sekiranya mengganggu atas ortodoksi. Sebenarnya hal inilah yang berimplikasi terhadap kerancuan antara kalam dan teks dengan pemikiran atau hasil penafsiran manusia mengenai ajaran agama, sehingga keduanya tidak dibedakan dengan baik, mana ajaran agama dan mana ajaran “manusia”. Di sisi lain, hasil pemikiran manusia juga selalu berada dalam konteks kesejarahan dan kebahasaan tertentu sehingga tidak dibedakan antara dimensi mitos dan dimensi sejarah.

¹⁹ Chabib Toha, “Epistemologi dalam Pendidikan Islam”, dalam *Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam* (Semarang: Pustaka Pelajar & Fak. Tarbiyah IAIN Wali Songo, 1996), 202.

pengetahuan akan memberikan arti yang sejati bagi kemaslahatan seluruh umat manusia.

Implementasi secara kontekstual nilai-nilai filosofis pendidikan tersebut dalam wacana filsafat pendidikan setidaknya menghasilkan dua pemahaman mendasar, yakni: *pertama*, lembaga pendidikan dipahami dalam ruang lingkup yang sangat luas, yang mencakup pembelajaran manusia (*human learning*) dalam rangka memproduksi kebudayaan dan masyarakat yang ideal. Oleh karena itu, bagi peserta didik, praktik pedagogik merupakan kesempatan untuk mengerti dan memahami bagaimana pengalaman-pengalaman budaya dan masyarakat dapat ditransformasikan dalam semua tataran kehidupan mereka di masa yang akan datang; *kedua*, lembaga pendidikan dapat dipahami dalam suatu hubungan antara ilmu pengetahuan dan kekuasaan yang secara ideologis sesungguhnya tidak sepenuhnya netral. Hal ini menyiratkan suatu fungsi utama dan substansial, bahwa lembaga pendidikan menjadi wahana pengembangan anak didik yang niscaya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Hal ini juga mengindikasikan bahwa lembaga pendidikan ikut bertanggungjawab untuk melakukan pendidikan politik untuk menanamkan harapan kepada peserta didik sebagai pelaku sejarah demi penegakan masyarakat yang beradab, adil, dan demokratis.

Untuk lebih operasional, Raichan Achwan mengemukakan gagasan yang menarik dengan menawarkan prosedur paradigma filosofis tersebut: (1) orientasi filosofis-metafisik, artinya perlu pengembangan realitas spiritual dan *experience* melalui peninjauan ulang persepsi tentang doktrin ideologik-ilahiyah yang dapat membatasi pengungkapan kegaiban alam, (2) orientasi filosofis-epistemologi, yaitu pengungkapan pengetahuan melalui *rethinking, sensation, experiencing, empirical verification* dengan *scientific method* dalam kajian sunatullah serta *conceptual* dan *logical analysis* terhadap ayat-ayat ilahiyah, (3) orientasi filosofis-aksiologis, artinya absolutisasi nilai-nilai ilahiyah dan relatifisasi nilai-nilai

manusiawi sepanjang dalam konteks ketuhanan, (4) orientasi filosofis-logis, artinya memahami wahyu melalui pendekatan prinsip-prinsip yang ditawarkan wahyu. Bagaimana kita harus mampu mendesain kaidah-kaidah logika untuk memahami ayat-ayat Allah (wahyu) berdasarkan logika wahyu itu sendiri, (5) implikasi edukasi²⁰ artinya kurikulum dan metodologi pendidikan Islam harus mampu membangun keterkaitan kehidupan dunia dan akhirat dalam makna yang elegan dan berimbang.

Karena itu, proses islamisasi ilmu atau pemakaian parameter-parameter keilmuan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam persoalan dunia (realitas) dan epistemologis adalah sesuatu yang mendesak dilakukan.²¹ Usaha islamisasi ilmu pengetahuan secara fundamental dilakukan dengan asumsi bahwa kerangka filosofis ilmu pengetahuan modern masih belum sepenuhnya menampung prinsip-prinsip kosmologi Islam yang tidak terbatas pada dunia empiris semata.

Sesuai dengan fokus pengembangan pendidikan tinggi agama di Indonesia, maka upaya pengembangan dengan wahana dialog

²⁰ Raichan Achwan, "Konstruksi Filosofis Pendidikan Islam", dalam *Rekonstruksi & Tradisi Pesantren Religiusitas IPTEK* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 73-5.

²¹ Islamisasi ilmu dalam pandangan Naquib al-Attas merupakan upaya untuk mengenali, memisahkan, dan mengasingkan unsur-unsur peradaban Barat yang cenderung dualistik, sekularistik, dan evolusioneristik yang pada dasarnya bersifat relativistik dan nihilistik dari tubuh pengetahuan sehingga pengetahuan yang dihasilkan benar-benar jernih dari unsur-unsur rasional dan ilmiah semata. Sebab unsur-unsur ini beserta aspek apapun yang dikandungnya tidak menggambarkan isi pengetahuan sejati, tetapi hanya menentukan bentuk dan karakter di mana pengetahuan dikonsepsikan, dievaluasikan, dan ditafsirkan sesuai dengan pandangan dunia Barat. Naquib al-Attas, *Islam dan Sekulerisme*, ter. Karsidjo (Bandung: Pustaka, 1981), 202. Pengertian islamisasi yang lain dari tokoh yang sama juga bermakna upaya pembebasan manusia dari unsur dan tradisi magis, animis, mitos, dan paham kebangsaan dan kebudayaan pra-Islam. Juga upaya penghindaran dari kendali sekuler atas nalar dan bahasa Islam. Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1992), 95.

maupun integrasi keilmuan dalam pendidikan Islam, khususnya antara ilmu agama dan sains modern dapat dijadikan pengayaan dan bahan studi perbandingan terhadap teori *Islamization of Knowledge ala* Ismail Raji al-Faruqi (Faruqian) maupun Naquib al-Attas (Naquibian). Hal yang kurang lebih sama diungkapkan juga oleh Fazlur Rahman dengan konsepsi teori *scientification of Islam* dan konsep teoritik dari Seyyed Hossein Nasr dengan istilah dimensi *spirituality of science*. Terlepas dari beban kritik yang berpendapat bahwa sikap di atas merupakan sikap yang terlalu reaktif maupun proaktif dalam menawarkan konsep keilmuan, gagasan-gagasan tersebut merupakan upaya serius dari pemikir-pemikir Islam untuk melakukan pengembangan wacana agama dan sains bagi kemajuan pendidikan Islam di masa datang.

Catatan Akhir

Ada *adagium* klasik yang menarik untuk dijadikan renungan dalam upaya melakukan reformasi pendidikan, yaitu “*al-muhâfadẓah ‘ala al-qadîm al-sâlih wa al-akbẓ bi al-jadîd al-aslah*” (melestarikan sesuatu yang lama dan bagus dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik). Pendidikan Islam jangan serta merta kehilangan dimensi dialektikal kongkret kemanusiaan dan dimensi vertikal keabadian yang menjadi karakteristiknya. Secara filosofis, pendidikan Islam tidak hanya menyentuh persoalan hidup yang multidimensional di dunia, tetapi juga menyangkut dimensi transendental. Karena itu, pendidikan Islam juga harus mampu menghasilkan *output* yang *free agents capable of awakening to the conditioning of our society*.²² Pendidikan Islam bukan melulu proses di mana manusia hanya memanjakan intelektualitasnya, tetapi *knowledge for better life and society*.

Oleh karena itu, Lembaga pendidikan formal harus semenjak dini mentradisikan dan menumbuhkembangkan kebiasaan

²²Michael Macklin, *When School Are Gone: Projection of The Rhought of Ivan Illich* (Queensland: Queensland University Press, 1967).

berpikir rasional yang mampu memahami fenomena-fenomena kehidupan secara komparatif, kontinuitas, kontradiktif, atau paradoksial, probabilitas, dan prediktif serta antisipatif. Sebab tugas utama lembaga pendidikan, dalam hal ini lembaga pendidikan Islam, adalah menumbuhkembangkan tiga hal, yaitu; pengembangan nalar rasional, pengembangan budi pekerti sesuai dengan nilai luhur agama dan budayanya, dan pengembangan profesionalisme yang sesuai dengan bakat kecenderungannya. Artinya, lembaga pendidikan-Islam bukan semata-mata untuk menanamkan dogma kepercayaan yang seharusnya diikuti oleh peserta didik, sekalipun hal ini secara “tipis” tetap tidak bisa terhindarkan. Sedangkan satu hal harus diingat dalam penanaman dogma, yaitu harus disertai dengan sikap rasionalitas supaya tidak terjebak pada sikap penyalahan secara membabi buta terhadap dogma agama lain. ●

Daftar Pustaka

- A. Malik Fadjar, “Menyiasati Kebutuhan Masyarakat Modern Terhadap Pendidikan Agama Luar Sekolah”, *Makalah* disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya tentang Pengembangan Pendidikan Islam Menyongsong Abad 21. _____, *Reformasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Fajar Dunia, 1999).
- Azyumardi Azra, *Modernisasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002).
- _____, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Chabib Toha, “Epistemologi dalam Pendidikan Islam”, dalam *Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam* (Semarang: Pustaka Pelajar & Fak. Tarbiyah IAIN Wali Songo, 1996).
- Deliar Noer, *Masalah Ulama Indonesia atau Intelektual Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

- Hujair A. H. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia* (Yogyakarta: Safirian Insani Press, 2003).
- Husni Rahim, “Pendidikan Agama di Indonesia (Perspektif Perguruan Tinggi Agama Islam)”, *Makalah* disampaikan dalam Seminar tentang Pendidikan Agama Islam di Indonesia oleh Program Pascasarjana UMY, 15 Juli 2004.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1998).
- Mohtar Buchori, “Peranan Pendidikan dalam Pembentukan Budaya Politik di Indonesia”, ed. Sidhunata, *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000).
- M. Amin Abdullah, “Problem Epistemologis-Metodologis Pendidikan Islam”, ed. Abd. Munir Mulkhan, *Rekonstruksi dan Tradisi Pesantren Religiusitas IPTEK* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).
- Naquib al-Attas, *Islam dan Sekulerisme*, ter. Karsidjo (Bandung: Pustaka, 1981).
- _____, *Konsep Pendidikan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1992).
- Paulo Freire, *Pedagogy of Opressed* (New York: Penguin, 1978).
- Romo Y. B. Mangunwijaya, “Kritik Manajemen Pendidikan Nasional Selama Orde Baru”, *KOMPAS*, 12 Februari 1999.
- Suyanto dan Jihad Hasyim, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III* (Yogyakarta: Adicipta Karya Nusa, 2000).
- Wasiullah Khan, *Education and Society in The Muslim Worlds* (Jeddah: Hodaler & Sroughton, t.t).